

PENGARUH BELANJA MODAL, TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMDA DI PROVINSI SE INDONESIA TAHUN 2019-2023

Diana Megasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru Riau

Email : dianamegasari19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019-2023. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sampel penelitian berjumlah 170 observasi yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan investasi daerah dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pengelolaan fiskal. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pusat juga berpengaruh positif signifikan, yang menegaskan peran dana transfer dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, di mana opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat teori stewardship pada sektor publik serta menjadi referensi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan.

Kata kunci: Belanja Modal, Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit, Kinerja Keuangan, Pemerintah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of capital expenditure, the level of regional government dependence on central government transfers, and audit opinions on the financial performance of regional governments across 34 provinces in Indonesia during the 2019-2023 period. A quantitative approach was employed using secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and audit reports from the Audit Board of Indonesia (BPK). The research sample consisted of 170 observations, analyzed through multiple linear regression with the assistance of statistical software. The results indicate that capital expenditure has a significant positive impact on financial performance, suggesting that increased regional investment can enhance the quality of public services and fiscal management. The level of regional dependence on central government transfers also shows a significant positive effect, underscoring the crucial role of intergovernmental transfers in

Article history

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 955

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

strengthening regional fiscal capacity. Furthermore, audit opinions significantly affect financial performance, with unqualified opinions (WTP) reflecting transparency and accountability in financial management. This study provides empirical evidence to reinforce stewardship theory in the public sector and offers practical implications for regional governments in improving financial governance.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Dependence, Audit Opinion, Financial Performance, Local Government

I. Pendahuluan

Dalam pelaksanaannya pemerintah turut mengatur terkait anggaran pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk mengatur dan melaksanakan tujuan dalam kemakmuran masyarakat. Anggaran Pemerintah Daerah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 16 Tentang Keuangan Negara APBD ini diatur sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah selama setahun yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah, APBD terdiri atas Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kinerja keuangan daerah merupakan sebuah cerminan keberhasilan daerah dalam mengelola keuangan guna pelaksanaan kegiatan otonom daerah. Diah dan Ketut (2019:4760) pengelolaan keuangan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari kesuksesan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan baik dan optimal maka jaminan tercapainya pengelolaan pemerintah daerah.

Salah satu penilaian terhadap kinerja keuangan pemda adalah realisasi anggaran, riau sendiri sudah memperoleh opini WTP selama 10 tahun berturut-turut (bpkad.riau.go.id) ternyata masih memiliki permasalahan salah satunya hal realisasi anggaran belanja daerah (APBD). Berdasarkan data resmi djpk.kemenkeu.go.id Pada tahun 2019, realisasi pendapatan daerah mencapai 101,42% dari target Rp 32,59 triliun. Pencapaian ini didukung terutama oleh transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yang melampaui target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai 93,61%, namun retribusi daerah sangat rendah hanya 47,30%. Pendapatan Asli Daerah merupakan gambaran kemandirian daerah dalam yang bersumber dari aspek-aspek ekonomi daerah itu sendiri semakin tinggi PAD suatu pemerintah daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan suatu kinerja keuangan daerah dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat kecil, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Yudi (2019).

Belanja daerah terealisasi 99,31% dari target Rp 32,81 triliun, dengan belanja modal sebesar 93,17%. Capaian ini menunjukkan serapan anggaran 2019 relatif baik, meskipun masih ada kelemahan pada sektor retribusi dan beberapa proyek modal yang tertunda. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adil yang mengatakan bahwa Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Endri dan Dini (2019) mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mana jika semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemda maka akan meningkatkan kualitas kinerja keuangan pemda.

Tahun 2020 menunjukkan penurunan signifikan. Realisasi pendapatan hanya 89,98% dari target Rp 33,98 triliun, dengan PAD turun ke 82,91% akibat dampak pandemi

COVID-19. Belanja daerah juga turun menjadi 87,55% dari target Rp 35,02 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal yang hanya 66,90%, sementara belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga justru melonjak tajam karena kebutuhan penanganan pandemi. Provinsi Riau sendiri memperoleh Opini Audit WTP walaupun realisasi anggaran tidak maksimal ternyata kinerja keuangan masih dinilai baik hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Pramesti (2023), berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre, dkk (2022) bahwa opini audit BPK tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemda.

Penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang pernah dilakukan oleh Khairunnisa (2017) mengenai Ukuran Pemerintah Daerah, Ketergantungan dengan Pemerintah Pusat dan Opini Audit BPK. Peneliti tertarik untuk merubah variabel ukuran pemerintah daerah dengan belanja modal dan melihat apakah variabel ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan dan perbedaan yang diperoleh dari beberapa peneliti diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Provinsi Riau Tahun 2019-2023”.

II. Tinjauan Pustaka

a. Landasan teori

1. Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sebagai kepentingan pemilik. Teori stewardship merupakan gambaran situasi dimana para manajer tidak termotivasi untuk melakukan kepentingan individu tetapi lebih mementingkan tujuan utama yaitu organisasi.

Teori stewardship pada organisasi sektor publik menggambarkan mengenai adanya pola pelayanan pemerintah (steward) pada Masyarakat (principal). Pemerintah (steward) berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada rakyat (principal) dengan mempublikasikan informasi baik kegagalan maupun kesuksesan yang terjadi pada organisasi itu. Pemda (steward) selaku institusi yang berwenang untuk mengatur serta mengurus pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat (principal). Pengambilan kebijakan oleh Pemda (steward) ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat (principal) (Saraswati et. al., 2024).

Keterkaitan teori stewardship dengan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana peran dan fungsi pemerintah sebagai lembaga atau instansi yang dipercaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah diberikan. dalam pertanggungjawaban tersebut peran pemda (steward) dan pengaudit internal untuk dapat mengatur pengendalian internal dalam menghasilkan laporan yang berkualitas.

2. Belanja Modal

Menurut Halim (2016): Belanja modal adalah pengeluaran daerah yang

menciptakan aset baru atau menambah nilai aset tetap yang sudah ada dan digunakan untuk operasional pemerintahan atau pelayanan masyarakat dalam jangka panjang. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (PEMDA)

Khasanah & Rahardjo (2014) dalam Ridwan (2020) memaparkan bahwasanya tingkat ketergantungan daerah ialah jenis pendanaan untuk area yang berasal dari pemerintahan induk maupun provinsi. Pemerintahan induk ataupun provinsi tentunya menuntut pengungkapan detail kepada pemda terkait pemakaian anggaran tersebut. Penyajian yang harus dilakukan pemda akan bertambah banyak apabila tingkat ketergantungan daerah semakin besar pula. Pertanggungjawaban atas dana yang diterima oleh pemda tersebut adalah bentuk upaya kesadaran dari pemda untuk memenuhi tanggung jawabnya secara transparan dan akuntabel kepada penggunaan anggaran juga didalam bentuk menjaga kepercayaan publik (masyarakat) kepada pemerintahan.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan banyaknya dana perimbangan yang diserahkan oleh pusat kepada pemda. Untuk melaksanakan desentralisasi, dana yang berpokok dari APBN tersebut diberikan pada daerah guna membiayai kegiatan daerahnya dana itu disebut dana perimbangan (Sumarjo, 2010) dalam Rafika Aulia (2020).

4. Opini Audit

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini Audit BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI. Semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2016) kinerja keuangan daerah adalah ukuran kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah seperti APBD. Kinerja keuangan ini dapat diukur melalui berbagai rasio keuangan yang mencerminkan kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah adalah suatu ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

b. Pengembangan hipotesis

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, belanja modal merupakan kelompok dari belanja daerah, yang dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam angka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap tak berwujud. pembangunan infrastruktur daerah berupa fasilitas umum adalah salah satu bentuk belanja modal yang menunjang pertumbuhan pendapatan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hastuti (2023) yang mengatakan bahwa belanja modal yang tinggi memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suandani dan Astawa (2021) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Secara teoritis investasi belanja tepat maka akan menambah modal. Investasi uang yang produktif pada akhirnya dapat menciptakan kekayaan finansial jangka panjang. Penelitian ini sesuai dengan teori stewardship yang menjelaskan hubungan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Sukses dalam organisasi dapat dicapai dengan meningkatkan nilai direktur dan manajemen

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemda Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat ketergantungan daerah mampu menjadi prediktor yang baik dalam menjelaskan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang berarti bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah maka akan menurun akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah maka akan memberikan kinerja keuangan semakin maksimal. Lestari et al. (2019) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irma (2020) menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan PEMDA berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini sesuai dengan teori stewardship dimana pemda (steward) dianggap sebagai pengelola sumber daya yang dipercayakan masyarakat untuk mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2 : Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Opini audit BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) , kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI. Semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaik kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Pramesti (2023) mengatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas laporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan teori stewardship dimana pemda dan pengaudit internal berperan sebagai pengawas dan serta menciptakan laporan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

III. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sehingga metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yang akan digunakan untuk meneliti pada populasi serta sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Lingkup dalam penelitian ini yakni menguji Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemda. Sumber data pada penelitian ini dari Direktorat Jenderal Pemeriksa Keuangan yang bisa diakses melalui situs resmi (www.djpk.kemenkeu.go.id) untuk melihat Laporan Realisasi Anggaran dan untuk variabel Opini Audit dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Audit tahun 2019 - 2023 yang bisa diakses melalui situs resmi (www.bpk.go.id). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan cara mengambil laporan keuangan yang dibutuhkan secara online berdasarkan permintaan informasi publik. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen, variabel terikat (*Dependent Variabel*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif dengan bantuan software statistik. Pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan software WarpPLS 7.0, yang dipilih karena mampu mendukung pengujian terhadap model hubungan antar variabel, termasuk analisis regresi linier maupun analisis jalur (path analysis) dalam kerangka SEM. Dan penelitian ini menggunakan dua jenis uji keabsahan data, yang pertama uji asumsi klasik yang dimana terdapat uji normalitas; heteroskedastisitas;

uji multikolinearitas; dan uji autokorelasi, dan yang kedua uji hipotesis dengan menggunakan uji t parsial.

IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Analisis Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan suatu keadaan variabel penelitian secara statistik , dengan nilai rata-rata , simpang baku (*Std. Deviation*), nilai minimum dan maksimum dari seluruh variabel dalam penelitian ini. Sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan	170	,89	1,09	,9975	,03316
Belanja Modal	170	,06	,34	,1753	,04236
Tingkat Ketergantungan Pemda	170	,23	,91	,6986	,15618
Opini Audit	170	,00	1,00	,8765	,33002
Valid N (listwise)	170				

Sumber : Data Primer diolah, 2025

- a. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel kinerja keuangan memiliki nilai minimum 0,89 atau presentase 89% dan nilai maximum sebesar 1,09 atau 109% dari nilai rata-rata 0,9975 atau 99% artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata , sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran kinerja keuangan menyebar secara menyeluruh.
- b. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum 0,06 atau presentase 6% dan nilai maximum sebesar 0,34 atau 34% dari nilai rata-rata 0,1753 atau 18% artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata , sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran belanja modal menyebar secara menyeluruh.
- c. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel tingkat ketergantungan memiliki nilai minimum 0,23 atau presentase 23% dan nilai maximum sebesar 0,91 atau 91% dari nilai rata-rata 0,6986 atau 70% artinya nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata , sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran tingkat ketergantungan menyebar secara menyeluruh.
- d. Berdasarkan hasil olah data SPSS Statistik 22, ditarik kesimpulan bahwa variabel opini audit memiliki nilai minimum 0,00 atau persentase 0% dan nilai maximum sebesar 1,00 atau 100% dari nilai rata-rata 0,8765 atau 88% artinya nilai standar

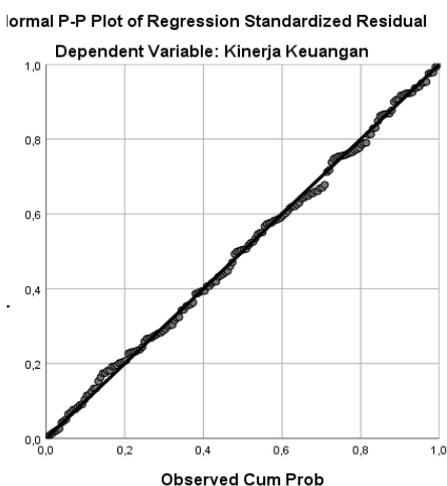
deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata , sehingga dapat disimpulkan bahwa data sebaran opini audit menyebar secara menyeluruh.

2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk menguji masing-masing variabel dalam model regresi untuk melihat variabel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak (Ghozali,2020). Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *kolmogorov-smirnov test*, dengan nilai *kolmogorov-smirnov* lebih besar dari 0,05 yang berarti data residual berdistribusi normal, atau model analisis regresi dikatakan baik dan tepat. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2 Uji Normalitas



One-Sample Test		Kolmogorov-Smirn
		Unstandardized Residual
N		170
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,02736898
Most Extreme Differences	Absolute	,034
	Positive	,034
	Negative	-,031
Test Statistic		,034
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber data primer diolah, 2025

Dari gambar Normal PP Plot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar dan mengikuti garis diagonal. Kemudian dari uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,200 > 0,05. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan karena penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel bebas (independen) dalam model regresi. Jika pada uji ini variabel independen (bebas) terbukti saling terkait maka, pengujian tidak dapat dilanjutkan, karena ketiadaan multikolinearitas pada variabel penelitian merupakan syarat dalam model regresi. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,1$ artinya data yang diuji dapat dikatakan memiliki multikolinearitas, akan tetapi jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ artinya data yang diuji tidak memiliki multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Belanja Modal	,811	1,233
	Tingkat Ketergantungan Pemda	,802	1,246
	Opini Audit	,976	1,025

Sumber data primer diolah, 2025

Dari Tabel diatas diperoleh nilai tolerance seluruh variabel independent sebesar 0,811; 0,802 dan 0,976 yang lebih besar dari 0,1 atau VIF sebesar 1,233; 1,246 dan 1,025 yang lebih kecil dari 10. Dapat diartikan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi.

c) Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan variansi dalam model regresi, dengan menggunakan uji *glejser* yang akan mengkorelasikan *absolute* residual dengan variabel bebas, dengan nilai signifikasnsinya > 0.05 maka variabel dinyatakan bebas heteroskedastisitas (Ghozali, 2020). Hasil uji heterokedasitas dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini

Tabel 4.4 Uji Heterokedastisitas

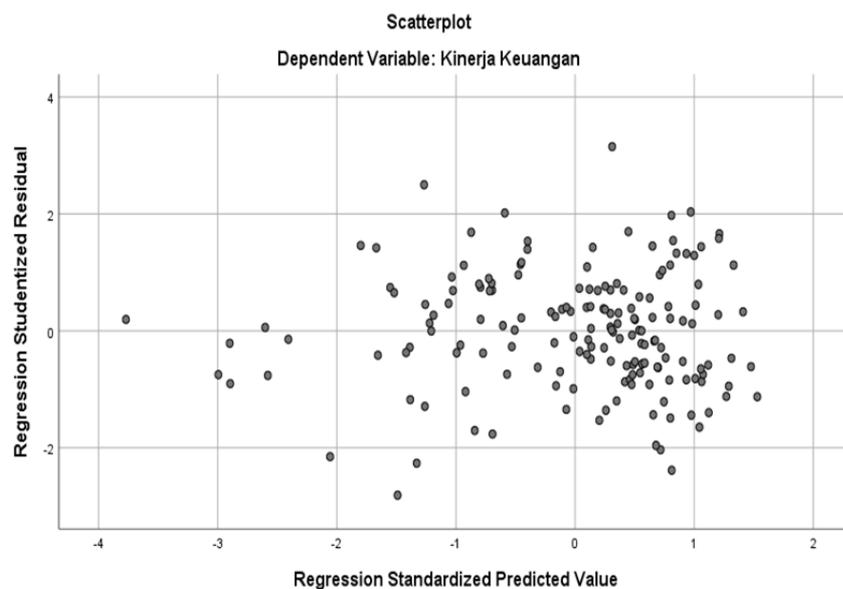
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,016	,007		2,251	,026
	Belanja Modal	,051	,034	,130	1,514	,132
	Tingkat Ketergantungan Pemda	-,003	,009	-,027	-,316	,752
	Opini Audit	-,001	,004	-,027	-,340	,734

Sumber data sekunder diolah, 2025

Dari uji *glejser* diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat variabel yang signifikan terhadap nilai residual ($0,132$; $0,752$ dan $0,734 > 0,05$). Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Gambar 4.1 Scatterplot



d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018:111). Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin Watson (DW). Menurut Ghozali (2018:112) dasar penentuan ada atau tidaknya kasus autokorelasi didasari oleh kaidah berikut:

1. $0 < d < dl$ = ada autokorelasi positif
2. $dl \leq d \leq du$ = tidak ada autokorelasi positif
3. $4 - dl < d < 4$ = ada autokorelasi negatif
4. $4 - du \leq d \leq 4 - dl$ = tidak ada autokorelasi negatif
5. $du < d < 4 - du$ = tidak ada autokorelasi positif atau negatif

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,565 ^a	,319	,306	,02762	1,901

a. Predictors: (Constant), Opini Audit, Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Pemda

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Diperoleh nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,901. Untuk jumlah data 170 dengan jumlah variabel independen 3, diperoleh nilai tabel sebagai berikut:

$$dL = 1,713$$

$$dU = 1,785$$

$$4-dL = 2,287$$

$$4-dU = 2,215$$

Dengan demikian maka diketahui bahwa $dU < DW < 4-dU = 1,785 < 1,901 < 2,215$. Artinya adalah bahwa tidak terjadi autokorelasi model regresi.

e). Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2020). Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6 Tabel Regresi Linear

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,900	,012		76,635	,000
Belanja Modal	,153	,056	,195	2,741	,007
Tingkat Ketergantungan Pemda	,058	,015	,273	3,812	,000
Opini Audit	,035	,007	,344	5,299	,000

Sumber data sekunder diolah, 2025

Persamaan Regresi Linier Berganda:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

$$Y = 0,900 + 0,153 X_1 + 0,058 X_2 + 0,035 X_3 + e$$

Arti persamaan regresi diatas adalah:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 0,900. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kinerja keuangan sebesar 0,900.
2. Diperoleh nilai koefisien regresi variabel belanja modal sebesar 0,153. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan belanja modal sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,153 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Diperoleh nilai koefisien regresi variabel tingkat ketergantungan pemda sebesar 0,058. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan ketergantungan pemda sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,058 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Diperoleh nilai koefisien regresi variabel opini audit sebesar 0,035. Artinya adalah bahwa semakin baik opini audit, maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,035 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain tetap.

Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

f) Uji Determinasi

Koefisien determinasi (*adjusted R²*) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan nilai antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Nilai *adjusted R²* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Hasil uji determinasi bisa dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7 Uji Determinasi (Adjusted R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,565 ^a	,319	,306	,02762	1,901

a. Predictors: (Constant), Opini Audit, Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Pemda

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber sekunder diolah, 2025

Diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,305. Artinya adalah sebesar 30,6% kinerja keuangan dipengaruhi oleh belanja modal, tingkat ketergantungan pemda dan opini audit.

g) Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi 0,05 artinya model penelitian tidak layak digunakan. Hasil uji simultan F bisa dilihat pada tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Uji Simultan F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,059	3	,020	25,894	,000 ^b
	Residual	,127	166	,001		
	Total	,186	169			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Opini Audit, Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan Pemda

Sumber data sekunder diolah, 2025

Dari Tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 25,894 dengan signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan persamaan:

$$\begin{aligned}
 F \text{ tabel} &= n - k - 1 ; k \\
 &= 170 - 3 - 1 ; 3 \\
 &= 166 ; 3 \\
 &= 2,659 \text{ (lihat tabel F dengan } df_1=3 \text{ dan } df_2=166)
 \end{aligned}$$

Keterangan: n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

1 = konstan.

Dengan demikian maka diperoleh hasil F hitung (25,894) > F tabel (2,659) atau signifikansi (0,000) < alpha (0,05). Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa belanja modal, tingkat ketergantungan pemda dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

h) Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t dilakukan untuk dapat mengetahui pengaruh masing masing variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Pengujian ini dilakukan dengan kriteria apabila nilai signifikansi 0,05 maka hipotesis ditolak. Hasil uji T Parsial bisa dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9 Uji T Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,900	,012		76,635	,000
	Belanja Modal	,153	,056	,195	2,741	,007
	Tingkat Ketergantungan Pemda	,058	,015	,273	3,812	,000
	Opini Audit	,035	,007	,344	5,299	,000

Sumber data sekunder diolah, 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat masing-masing nilai t hitung dan signifikansi variabel bebas. Diketahui nilai t tabel (uji 2 sisi pada alpha 5%) dengan persamaan:

$$\begin{aligned}
 t \text{ tabel} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\
 &= 170 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\
 &= 166 : 0,025 \\
 &= 1,974 \text{ (lihat tabel t dengan df=166 pada level significance 0,025)}
 \end{aligned}$$

Keterangan: n = Jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas

1 = konstan.

2. Pembahasan

2.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, variabel belanja modal memiliki nilai t hitung sebesar 2,741 dengan signifikansi 0,007. Maka diketahui t hitung (2,741) > t tabel (1,974) atau signifikansi (0,007) < 0,05. Artinya belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda. Semakin tinggi belanja modal maka kinerja keuangan Pemda semakin meningkat. Hal ini dikarenakan belanja modal dapat menghasilkan aset yang mampu menunjang pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan, sehingga dengan adanya belanja modal yang efektif Pemerintah Daerah dapat menunjukkan tata kelola keuangan yang sehat, produktif dan berorientasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Zahrah, et al. (2024) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh

masyarakat umum, sehingga jumlah alokasi tahunan cenderung relatif besar karena penggunaan aset yang dihasilkan akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Dengan demikian, semakin besarnya belanja modal akan mencerminkan investasi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi dan sosial di daerah, sehingga akan mempengaruhi meningkatnya kinerja keuangan Pemda.

Sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan hubungan erat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. Dimana, Pemda (*steward*) selaku institusi mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat (prinsipal). Dalam meningkatkan kinerja keuangannya, Pemda akan mengatur belanja modal yang digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum dan sosial, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik akan menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi serta pada waktunya dapat terjadinya peningkatan pada pertumbuhan kesejahteraan (Andirfa dalam penelitian Juwita & Hasbi, 2022). Dengan demikian, belanja modal yang tinggi telah menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang baik, karena tanpa pengelolaan yang baik maka belanja modal tidak akan dapat dilakukan dalam jumlah yang banyak (Suandani & Astawa, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukannya oleh hastuti (2023); Suandani dan Astawa (2021) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan PEMDA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis dua, variabel tingkat ketergantungan Pemda memiliki nilai t hitung sebesar 3,812 dengan signifikansi 0,000. Maka diketahui t hitung ($3,812$) < t tabel ($1,974$) atau signifikansi ($0,000$) < $0,05$. Artinya tingkat ketergantungan pemda berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemda, maka kinerja keuangan Pemda semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat telah memberikan dampak secara langsung terhadap kapasitas anggaran, efektivitas belanja, dan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian, ketergantungan Pemda melalui dana transfer pusat dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Sesuai dengan teori *stewardship* dimana pemda (*steward*) dianggap sebagai pengelola sumber daya yang dipercayakan masyarakat untuk mengelola keuangan daerah. Sumber daya yang diperoleh dari dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai belanja prioritas, memperluas jangkauan layanan publik, serta mendorong efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Menurut Juwita & Hasbi (2022) dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemda bertujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah, yang apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah maka akan terjadi defisit, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Pemerintah Pusat mentransfer dana kepada Pemda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Irma (2020) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan Pemda berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3 Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis tiga, variabel opini audit memiliki nilai t hitung sebesar 5,299 dengan signifikansi 0,000. Maka diketahui t hitung (5,299) > t tabel (1,974) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Artinya opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Semakin baik opini audit, maka kinerja keuangan Pemda semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pemda yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian dari BPK mengindikasikan bahwa Pemda telah mengelola keuangan secara transparan, patuh terhadap peraturan, efisien dan akuntabel dalam penggunaan anggaran. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Suandani & Astawa, (2021) yang menyatakan bahwa semakin baiknya opini audit pemerintah daerah akan membuat masyarakat lebih percaya dengan pemerintah untuk mengelola keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, Pemda yang mendapatkan opini audit WTP akan memperoleh sejumlah manfaat seperti meningkatnya kepercayaan masyarakat, memiliki peluang pendanaan yang lebih besar dan mampu mendorong kinerja keuangan yang lebih baik serta meningkat.

Sejalan dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa peran dan fungsi pemerintah sebagai lembaga atau instansi bisa dipercaya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah diberikan, sehingga dalam pertanggungjawaban tersebut peran pemda (stewart) dan pengaudit internal adalah mengatur pengendalian internal dalam menghasilkan laporan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari hasil opini audit. Opini audit sebagai cerminan dari kualitas laporan keuangan yang apabila laporan keuangan tersebut mendapat opini audit WTP maka Pemda telah mengelola keuangan dengan efektif, sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan Pemda. Dengan adanya opini audit, maka pihak-pihak yang tertarik atau ingin memperoleh dan melihat informasi sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah apakah telah mencapai tingkat maksimal atau belum dapat dilihat pada opini audit BPK (Insani, et al., 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suandani & Astawa (2021); Sundari & Pramesti (2023) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemda.

V. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H1 diterima, artinya semakin banyak investasi belanja modal dilakukan dan dilakukan dengan tepat maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemda dan pada akhirnya bisa meningkatkan kekayaan finansial jangka panjang.
2. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H2 diterima, artinya semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat maka menunjukkan bahwa pemda tersebut tidak mampu untuk mengelola sumber dayanya sendiri hal ini akan membuat pemda sulit dalam melaksanakan proses pembangunan daerah dan hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan pemda tersebut.

3. Hasil pengujian statistik menyatakan bahwa H3 diterima, artinya jika opini audit yang diterima WTP maka menandakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut bagus dan kinerja keuangan pemda tersebut pun baik. Kinerja keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan publik dan kualitas pemda itu sendiri.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain selain belanja modal, tingkat ketergantungan pemda dan opini audit untuk dapat diteliti lebih lanjut, serta menambahkan subjek permasalahan untuk mendapatkan temuan baru yang lebih komprehensif.

VI. Daftar pustaka

Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109-125. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>

Juwita, A., & Hasbi, K. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2022. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 65-78. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i1.3315>

Suandani, K. P., & Astawa, G. P. B. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 2614-1930.

Zahrah, F. A., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(1), 369-384. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2422>

Ayu, P. P. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri Vol. 3 No. 1*, 80-96.

Creswell, J. W. (2011). *Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Pendidikan*. Pekanbaru: Umri press.

Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol.4 No.1, 34-38.

Amin Insani, S. R. (2023). DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 109-125.

Astawa, K. P. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 728-739.

Astawa, K. P. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 728-739.

Fatimah Az Zahrah, M. R. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 369-384.

Kusnadewi Lestari, . S. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi). *Miaunja* , 53-67.

Kusumawati, A. A. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 6984-6995.

Malik, W. O. (2023). Analisis Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 24-40.

Novita Niswani, I. R. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020 . *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH*, 65-78.

Pramesti, A. D. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 1671-1683.

Rahmawati, R. A. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 584-598.

Sulardi, A. S. (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 175-192.